686

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA / KAJIAN WANITA



PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN JEMBER

Oleh: ATIK RAHMAWATI, S.Sos. NI'MAL BAROYA, S. KM.

DIBIAYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Nemor: 008/SP2H/PP/DP2M/III/2007

> FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIVERSITAS JEMBER NOVEMBER, 2007

uk 2008 LP. 2007

1

86

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MUDA / KAJIAN WANITA



PENDAMPINGAN SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PASCA BENCANA ALAM DI KABUPATEN JEMBER

Oleh: ATIK RAHMAWATI, S.Soc. NI'MAL BAROYA, S. KM.

TIDAK DIPAGAMKAN KELUAR

DIBIAYAI OLEH DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor: 008/SP2H/PP/DP2M/HH/2007

ASAL : HAMAH / PEMBELIAN

TERIMA : TGL.

NO INDUK :

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL UNIVERSITAS JEMBER NOVEMBER, 2007

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MUDA/KAJIAN WANITA

Judul Penelitian : Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pasca Bencana Alam Di Kabupaten Jember 2. Bidang Ilmu Penelitian Sosial Politik 3. Ketua Peneliti a. Nama Lengkap Atik Rahmawati, S.Sos. b. Jenis Kelamin Perempuan c. NIP. 132 310 227 d. Pangkat/Golongan Penata Muda/III.a e. Jabatan : Tenaga Pengajar f. Fakultas/Jurusan : FISIP/Kesejahteraan Sosial 4. Jumlah Tim Peneliti : 2 (dua) orang 5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Jember, Jawa Timur. 6. Bila penelitian ini merupakan kerjasama kelembagaan a. Nama Instansi b. Alamat 7. Waktu Penelitian : 10 (sepuluh) bulan Biaya : Rp. 9.000.000,-Jember, 10 November 2007 Mengetahui Ketua Peneliti Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik PENDIUniversitas Jember Dr. H. Uung Nasdia, BSW., MS.

Atik Rahmawati, S.Sos. NIP. 132 130 227

NIB. 130 674 836



Menyetujui,



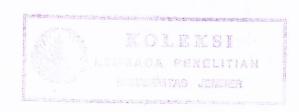
RINGKASAN

Bencana alam yang terjadi telah mengakibatkan perubahan kehidupan masyarakat khususnya bagi korban bencana itu sendiri, tidak hanya kerusakan pada pola-pola kehidupan normal, kematian, hilang, luka, kecacatan, trauma psikis, keterpisahan dengan anggota keluarga, keterlantaran, kesengsaraan maupun berbagai akibat negatif pada kesehatan jangka pendek maupun jangka panjang, menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merugikan struktur sosial seperti kerusakan sistem pemerintah, bangunan, jaringan komunikasi dan berbagai pelayanan umum utama, dan juga munculnya kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal, makanan, pakaian, bantuan kesehatan dan juga pelayanan sosial. Interaksi dengan pihak lain yang berperan sebagai pendamping dapat memperlancar proses pemulihan keberfungsian kehidupan normal masyarakat.

Permasalahan sosial akan terjadi ketika fungsi sosial yang seharusnya dilaksanakan seseorang atau kolektif tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Fungsi lingkungan sosial yang tidak berjalan akan menimbulkan permaslahan tersendiri. Keberfungsian tidaklah mengandung makna satu arah yaitu individu atau masyarakat terhadap lingkungannya tetapi mencakup dua arah

Pelaksanaan pendampingan bukan hanya dimaknai sebagai program yang harus dilakukan tanpa memandang segi keberlanjutan, kemanfaatan dari program tersebut. Pendampingan yang dilaksanakan sebatas program tanpa perencanaan yang matang kurang mendatangkan manfaat bagi penerima. Begitu juga dengan perencanaan dan kontinuitas pendampingan sosial yang akan dilaksakan terhadap korban bencana. Pelaksanaan pendampingan tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya bencana, di lokasi penampungan sementara tetapi juga membutuhkan perhatian ketika korban sudah menempati relokasi baru. Pelaksanaan dilakukan dengan tiga peran yang menyertai yaitu sebagai :

- Konsultasi pemecahan masalah dengan peran sebagai fasilitator, pembela dan pelindung.
- 2. Manajemen sumber dengan peran sebagai fasilitator, broker, mediator. Dapat dilakukan melalui strategi aksi sosial.



3. Pendidikan dengan peran sebagai fasilitator dan mediator.Dilakukan dengan strategi pendidikan masyarakat.

Keterkaitan ketiga elemen masyarakat sangat mempengaruhi jalannya proses pendampingan yang akan dilakukan, pemerintah sebagai pihak yang mempunyai otoritas pelaksana kebijakan dengan kewenangan mutlak terhadap jalannya proses pendampingan, organisasi kemasyarakatan yang memberikan kontribusi langsung selama pelaksaan pendampingan melalui program yang nyata, serta masyarakat sebagai korban sekaligus subyek penerima pelayanan keikut sertaan korban pada akhirnya menjadikan mereka berdaya mampu secara mandiri menemukan solusi permalahan yang ada.

Sebagai wahana penciptaan proses perberdayaan masyarakat bagi korban bencana, pendampingan sosial yang dilakukan dengan ikut melibatkan elemen masyarakat sebagai korban sekaligus subyek penerima pelayanan menuju pendewasaan masyarakat secara mandiri selain itu dibarengi juga dengan usaha-usaha preventif, kuratif dan rehabilitatif. Pendampingan tidak hanya dilakukan pada proses tanggap darurat tetapi juga pada proses recovery. Dengan demikian perlu di rancang strategi-strategi dalam pelaksanaan pendampingan. Strategi dan planning yang matang pada akhirnya akan mendatangkan kemanfaatan yang lebih disbanding dengan hanya pelaksaan program yang hanya sebatas program dadakan.

Selain itu juga perlu adanya usaha pencegahan sejak dini bencana alam. Dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam sehingga bencana alam tidak terjadi secara berulang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara penyadaran kepada masyarakat sekitar terhadap akibat yang akan ditimbulkan dari adanya bencana yang akan muncul sewaktu-waktu disemping dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk ikut serta mempertahankan dan melindungi lingkungan alam sebagai

